

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus kebijakan luar negeri Finlandia dalam Krisis Ukraina pada 2014, penelitian ini telah menunjukkan bahwa suatu negara bisa memilih untuk tidak menjalankan kebijakan yang telah lama dipraktikkannya dalam menghadapi suatu situasi. Kebijakan tersebut adalah berpartisipasi penuh dalam *peacemaking* suatu konflik dalam hubungan internasional, salah satunya dengan menjadi mediator dalam konflik antar negara. Kebijakan Finlandia memainkan peran tradisionalnya sebagai *peacemaker* dapat dijelaskan dalam pemikiran konstruktivis, dengan konsep identitas. Menurut konstruktivis, suatu negara bisa menghadapi dilema dalam menentukan suatu kebijakan karena identitas-identitas yang dimiliki oleh negara tersebut bisa jadi saling bertolak belakang. Konflik identitas semakin rumit ketika keduanya sama-sama penting dan menentukan posisi negara tersebut dalam hubungan internasional.

Penelitian ini menemukan bahwa Finlandia mengalami konflik identitas antara identitas peran sebagai *peacemaker* dengan identitas kolektif sebagai negara anggota Uni Eropa yang kontra terhadap sikap Rusia dalam berkonflik dengan Ukraina. Kedua identitas yang dimilikinya sama-sama menjadi titik acuan Finlandia dalam merencanakan dan menentukan kebijakan luar negerinya dalam menghadapi situasi hubungan internasional. Oleh sebab itu Finlandia sempat

mengalami dilema dimana dia harus memilih salah satu identitas yang dimilikinya sebelum menindaklanjuti kebijakan luar negerinya dalam menanggapi Krisis Ukraina. Kedua identitas ini menunjukkan benturan ketika Finlandia menginginkan adanya mediasi antara Ukraina dan Rusia agar konflik di Ukraina dapat diakhiri dengan segera. Tetapi di saat yang bersamaan, rasa solidaritas yang terbentuk antara Uni Eropa dengan Finlandia cenderung lebih kuat. Sehingga Finlandia justru ikut terlibat dalam menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia yang dicanangkan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Tindakannya ini pula menimbulkan terjadinya krisis identitas yang dimiliki Finlandia sebagai *peacemaker*.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama, penelitian ini belum mampu menjelaskan lebih lanjut bagaimana hubungan Finlandia dengan Rusia sebelum dan setelah Krisis Ukraina. Hubungan antara kedua negara tersebut bisa menjadi faktor lain Finlandia untuk lebih berpihak kepada Uni Eropa, namun di sisi lain juga tetap menjaga hubungan bilateral dengan Rusia. Kedua, dengan batasan jangkauan penelitian hanya pada tahun 2014 saja, penelitian ini belum mampu menjelaskan bagaimana sikap Finlandia dalam menentukan identitas dan kebijakannya pasca 2014 mengingat Krisis Ukraina masih berlangsung hingga sekarang. Ketiga, penelitian ini masih belum menjelaskan lebih detail tanggapan Uni Eropa, Ukraina maupun Rusia ketika Finlandia memutuskan untuk tidak memainkan perannya sebagai *peacemaker*. Tanggapan dari negara lain juga menjadi faktor tambahan mengapa Finlandia tidak menggunakan identitasnya sebagai *peacemaker*, serta mempengaruhi identitas

peran Finlandia sebagai *peacemaker* itu sendiri. Pengaruh tersebut dapat berakhir apabila Finlandia mengembalikan identitasnya sebagai *peacemaker* dengan mengadakan mediasi, atau tetap bertahan memilih berpihak kepada Uni Eropa. Terakhir, penelitian ini belum mampu memaparkan lebih detail akan bagaimana proses pemerintah Finlandia mengatasi dilema kebijakan tersebut, dengan berakhir berupa memilih salah satu identitas yang berbenturan tersebut. Hal ini juga menentukan bagaimana selama ini kebijakan luar negeri Finlandia beradaptasi dengan situasi dalam hubungan internasional, sehingga Finlandia dapat menghindari lebih banyak konflik semenjak penerapan status netralitasnya pada tahun 1948.

5.2 Saran

Setelah memaparkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis dapat memberikan beberapa saran kepada pemerintah Finlandia maupun perumus kebijakan luar negeri suatu negara. Pertama, negara harus memperhatikan setiap identitas yang dimilikinya untuk mencegah terjadinya konflik identitas ketika negara tersebut akan menentukan suatu kebijakan. Kedua, negara harus memperhitungkan dampak dari setiap kebijakan berdasar identitas yang dipilihnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terakhir, negara harus dapat mempertahankan identitas miliknya baik dalam situasi apapun, terutama apabila identitas tersebut telah dimilikinya sejak lama dan sudah dikenal luas secara internasional.

Selain itu penulis dapat memberikan saran kepada pembaca yang tertarik terhadap topik kebijakan luar negeri dalam menghadapi Krisis Ukraina untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Di antaranya adalah analisa kebijakan Finlandia dalam menghadapi Krisis Ukraina pasca 2014. Hal ini dapat ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui identitas manakah yang selanjutnya diperankan oleh Finlandia, bagaimana cara Finlandia menentukan kebijakannya setelah mengalami dilema, dan kebijakan apa saja yang telah dijalankannya dengan menggunakan identitas tersebut. Kemudian penelitian mengenai reaksi dan kebijakan luar negeri yang diterapkan Uni Eropa, Ukraina dan Rusia selama Krisis Ukraina berlangsung. Hal ini dapat ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam Krisis Ukraina menerapkan kebijakan mereka seiring belum ada satupun negara yang bersedia menjadi mediator di antara mereka.